PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PANTAI LOSARI KOTA MAKASSAR

Abdul Rachim Rauf *)

Abstract : Increased street vendors in urban areas provide two influences are positive and negative influences. Positive influence that this business can meet the needs of street vendors, can provide jobs, to contribute to local revenues through sales tax. Generated negative influences is the location occupied by irregular so as to disturb public order such as in doorways, sidewalks, street corners persimpanagn, as well as in various places of the city which is considered good to do business so that the bustle of the city atmosphere, the beauty of the city becomes blurred, obstructed traffic flow and sometimes crime increases, the more dense settlements, as well as hygiene and health is not maintained.

Losari local elections are the object of research is based on the consideration that the street vendors in Losari different from street vendors in other public places. Here does not happen destruction and persecution from the government because it is closely associated with the development of Makassar as a Metropolitan City. Therefore, the government issued Decree No. 3479 Mayor Ujung Pandang 1992 on Appointment and Five Foot Settings on The Merchants Throughout Losari.

Keyword : The role of Government

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran pedagang kaki lima merupakan salah satu ciri khas tersendiri bagi kehidupan masyarakat kota yang masih dalam tahap berkembang. Pedagang kaki lima ini tumbuh dan berkembang karena berkurangnya lapangan pekerjaan, banyak anak-anak putus sekolah, kebutuhan hidup yang semakin sulit, serta adanya asumsi masyarakat desa tentang kehidupan yang lebih baik di perkotaan.

Meningkatnya pedagang kaki lima di daerah perkotaan memberikan dua pengaruh yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif yaitu usaha ini dapat memenuhi kebutuhan para pedagang kaki lima, dapat memberikan lapangan pekerjaan, dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah melalui pajak penjualan. Pengaruh negatif yang ditimbulkan adalah lokasi yang ditempati tidak teratur sehingga dapat mengganggu ketertiban umum seperti berada di emper-emper toko, trotoar, sudut persimpangan jalan, serta di berbagai tempat keramaian kota yang dianggap baik untuk melaksanakan usahanya sehingga suasana kota

semakin pikuk, keindahan kota menjadi kabur, arus lalu lintas terhambat dan terkadang kejahatan meningkat, tempat pemukiman semakin padat, serta kebersihan dan kesehatan tidak terpelihara.

Masalah-masalah tersebut membuktikan bahwa kehadiran pedagang kaki lima cukup kompleks dan sulit untuk diselidiki secara mendalam. Tetapi, pemerintah selalau berusaha mencari jalan keluarnya melalui usaha penertiban lokasi, pemberian modal, penyuluhan bidang pengembangan usaha, bantuan peralatan kebersihan dan kesehatan, serta penyediaan sarana penerangan. Hal ini dilakukan karena kehadiran pedagang kaki lima dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah utamanya dalam menyerap tenaga kerja yang tidak dapat tertampung di bidang formal dan dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pemikiran pemerintah sehingga ditetapkannya Pantai Losari sebagai tempat sementara para pedagang kaki lima ?

2. Bagaimanakah peranan pemerintah dalam pembinaan pedagang kaki lima di Pantai Losari, Makassar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pemikiran pemerintah sehingga ditetapkannya Pantai Losari sebagai tempat sementara para pedagang kaki lima.
2. Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pembinaan pedagang kaki lima di Pantai Losari, Makassar

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai :

1. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya dalam mengambil keputusan agar lebih meningkatkan usaha-usaha pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima.
2. Sebagai sumbangan informasi bagi berbagai pihak yang bergelut dalam bidang sosial, khususnya pemerhati bidang kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Poerwadarminto (1986) bahwa secara etimologi (bahasa), istilah pedagang kaki lima adalah suatu istilah yang ditujukan kepada suatu bentuk pemasaran barang-barang atau berbagai kebutuhan hidup dengan cara menggelar dagangannya di pinggir jalan raya, di pinggir-pinggir pasar, dan sebagainya.

Dari pengertian di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

- a. Pedagang kaki lima adalah salah satu bentuk perdagangan sektor informal dengan cara menggelar kebutuhan hidup kepada para konsumen
- b. Pedagang kaki lima adalah sebagai perantara pemasaran

yang mengambil lokasi penjualan yang sebenar-benarnya bukan tempat untuk berjual beli.

- c. Pedagang kaki lima adalah salah satu jenis penjualan yang menggunakan modal yang relatif kecil sehingga dengan sendirinya kurang dapat menunjang pendapatan perkapita masyarakat, utamanya para pedagang kaki lima.
- d. Tumbuh suburnya pedagang kaki lima adalah salah satu akibat yang ditimbulkan oleh semakin banyaknya pendatang dari daerah ke kota dan semakin meningkatnya jumlah pengangguran.
- e. Pedagang kaki lima itu sendiri dapat mengundang perhatian masyarakat atau mendapat tanggapan dari masyarakat sebagai salah satu bentuk kejahatan dan menyamakannya sebagai parasit, pengemis, dan sebagainya seperti yang diberitakan di media cetak.

2. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima

Ciri-ciri lain pedagang kaki lima menurut Wirosardjono (1985) adalah sebagai berikut :

- a. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam angkatan kerja
- b. Tidak mempunyai tempat yang tetap atau keterkaitan dengan usaha-usaha lain
- c. Modal, peralatan, dan perlengkapan maupun omsetnya biasanya kecil.
- d. Umumnya tiap-tiap satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit
- e. Pola kegiatannya tidak teratur baik dalam arti waktu, permodalan, maupun penerimaannya.
- f. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat ekonomi lemah.

Dari pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan ciri-ciri pedagang kaki lima secara umum yaitu :

- a. Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan maupun penerimannya
- b. Mereka tidak memiliki surat izin berusaha
- c. Lokasi yang ditempati berusaha bukan hak miliknya melainkan milik pemerintah
- d. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap angkatan kerja.
- e. Tidak mengutamakan sistem permodalan, peralatan, dan perlengkapan yang besar seperti yang digunakan oleh sistem pertokoan
- f. Bersifat spesialisasi pada jenis-jenis barang yang diperjualbelikan
- g. Merupakan bentuk penjualan yang tidak resmi (informal)
- h. Pengelompokan jenis jualannya terbatas pada kebutuhan sehari-hari bagi setiap konsumen dan mempekerjakan tenaga kerja yang sedikit
- i. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat ekonomi lemah.

3. *Akibat Sampingan yang Ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima*

- a. Akibat sampingan yang berhubungan dengan sistem perekonomian. Pada umumnya pedagang kaki lima menggunakan modal kecil sehingga mereka memperoleh keuntungan dalam jumlah kecil/sedikit, sedang biaya hidup yang dibutuhkan semakin hari semakin meningkat.
- b. Akibat sampingan yang berhubungan dengan penataan

fisik perkotaan. Berdasarkan asumsi masyarakat desa bahwa tinggal di kota lebih muda memperoleh sumber kehidupan (uang) dibandingkan dengan di desa sehingga banyak orang berbondong-bondong ke kota, tanpa memikirkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki, akibatnya mereka seolah-olah nekad untuk mencari nafkah tanpa memperhitungkan tata aturan masyarakat kota yang bersangkutan.

- c. Akibat sampingan yang berhubungan dengan kebersihan dan kesehatan. Pedagang kaki lima pada umumnya tidak memikirkan tempat tinggal dan lokasi yang tetap demikian pula kebiasaan-kebiasaan/keteraturan hidup yang mereka bawa sebagai orang kampung kurang cocok dengan keteraturan hidup yang dimiliki oleh masyarakat di kota sehingga tidak heran apabila sampah-sampah bertebaran di sepanjang jalan dan parit-parit di setiap pasar dan sekitarnya.

B. **Kerangka Berpikir**

Keberadaan pengusaha ekonomi lemah, khususnya pedagang kaki lima termasuk pedagang asongan di daerah-daerah merupakan salah satu potensi sosial ekonomi masyarakat yang telah memberikan peranan yang cukup berarti dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut dengan memperhatikan arah kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah maka kegiatan usaha pedagang kaki lima perlu dibina dan diarahkan agar dapat berkembang semakin meningkat serta tidak lagi menimbulkan gangguan di bidang keamanan lalu lintas, kebersihan dan

kesehatan di bidang keamanan lalu lintas, kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan sebagainya.

Dalam hal ini perlu diketahui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima di daerah Pantai Losari Kota Makassar. Dalam hal ini, pembahasan dan analisa ditujukan kepada bentuk-bentuk usaha pembinaan dan penertiban serta tujuan yang ingin dicapai.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Defenisi Operasional

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, pedagang kaki lima berusaha memperoleh hasil penjualan dengan sebanyak-banyaknya. Dewasa ini, pedagang kaki lima dikenal oleh kalangan masyarakat utamanya masyarakat kota. Istilah ini secara spontanitas dimaksudkan dan ditujukan kepada seseorang yang menekuni suatu profesi sebagai penjual kebutuhan yang tidak menetap. Dalam hal ini mereka memperoleh kesan bahwa pedagang kaki lima itu sebagai bentuk pemasaran yang tidak resmi.

Dalam hal ini pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima terus digalakkan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengaturan tempat dan waktu berdagang/berusaha, penyuluhan di bidang usaha, perkreditan/pemodalan, penyediaan dan pengaturan tempat, organisasi dan manajemen usaha serta pengawasannya.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Dengan metode ini, penulis mendapatkan data dan informasi dengan cara mengadakan pengamatan langsung kepada obyek penelitian yaitu pedagang kaki lima yang berada di daerah Pantai Losari dan pemerintah yang melakukan pembinaan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

2. Teknik Wawancara

Untuk memperoleh data secara lebih mendalam maka diadakan wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Sedangkan dari pihak pemerintah sebagai responden adalah pemerintah Kota Makassar yang antara lain: Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Parawisata, pemerintah wilayah kecamatan/kelurahan tempat lokasi.

3. Teknik Dokumentasi

Cara pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, terutama yang berkaitan dengan obyek penelitian. Cara ini dilakukan dengan jalan mencatat data yang terdapat di papan potensi kantor dan catatan-catatan administrasi yang ada sebagai bahan untuk analisa data. Untuk menghitung prosentase maka digunakan rumus:

E. Analisa Data

Data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif untuk melihat permasalahan yang ada dan menentukan solusi atas permasalahan yang ada. Untuk analisa prosentase dari setiap perhitungan digunakan rumus :

$$\% = \frac{n}{N} \times 100 \%$$

dimana :

% = Persentase

n = Frekuensi yang dicapai setiap opsi

N = Jumlah sampel

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pedagang Kaki Lima Menurut Suku

Pedagang kaki lima di Pantai Losari semakin hari semakin bertam-

bah populasinya. Pada umumnya, mereka berasal dari daerah dan bahkan banyak yang berasal dari luar propinsi seperti dari Pulau Jawa. Berikut ini diberikan prosentase pedagang kaki lima menurut suku di Pantai Losari, Makassar.

Tabel 1. Prosentase Pedagang Kaki Lima Menurut Suku di Pantai Losari, Makassar

No.	Suku	F	Prosentase (%)
1	Makassar	7	23
2	Bugis	9	30
3	Mandar	2	13
4	Toraja	4	7
5	Jawa	18	60
Jumlah		30	100

Sumber : Hasil Wawancara Tahun 2003

Tabel I di atas memperlihatkan bahwa prosentase di antara suku asal pedagang kaki lima di tempat ini cukup berbeda. Prosentase pedagang kaki lima tertinggi adalah suku Jawa sebanyak 60 %. Dalam hal ini, suku Jawa lebih banyak berekspansi dibandingkan dengan suku Makassar sebagai suku asli di Kota Makassar. Selanjutnya, suku Bugis dengan prosentase 30 %, kemudian suku Makassar sebanyak 23 %. Seharusnya, suku Makassar harus lebih banyak dari suku-suku lainnya, tetapi karena persaingan tempat dan peluang tergantung dari kemampuan seorang pedagang menyiasati jualannya. Persaingan ini menyebabkan adanya pemilihan lokasi lain untuk menghindari dari kerugian. Selanjutnya suku Mandar sebanyak 13 %. Kemudian suku Toraja sebanyak 7 %.

B. Latar belakang Timbulnya Usaha Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pantai Losari Makassar

Sebagaimana kenyataan bahwa keberadaan pedagang kaki lima dalam sektor informal yang lahir dan berkembang sejalan perkembangan masya-

rakat kota itu sendiri adalah salah satu ciri khas kehidupan masyarakat kota yang masih dalam tahap berkembang, nampak bahwa munculnya para pedagang kaki lima sebagai reaksi semakin banyaknya jumlah penduduk. Hal ini juga terjadi karena semakin banyaknya imigran yang masuk ke kota dengan bidang profesi yang diketukunya yaitu sebagai pedagang atau penjual dalam bidang jasa.

Keberadaan ini memberikan dampak pada dua hal yang ditimbulkannya yaitu nilai positif dan produktif dimana tepenuhinya kebutuhan hidup mereka walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana, berfungsi sebagai pedagang perantara yang secara langsung kepada para konsumen dan sebagai saah satu sumber pendapatan daerah melalui pajak penjualan dan retribusi, namun di sisi lain terdapat pula akibat sampingan yang ditimbulkannya yaitu keuntungan yang diperoleh relatif minim (tidak seimbang antara pengeluaran dan pemasukan), dapat mengurangi nilai keindahan kota karenasemakin menyempitnya lokasi perhubungan darat, tempat pemukiman semakin padat yang dapat mengganggu kebersihan lingkungan yang dapat mengundang timbulnya wabah penyakit di kalangan masyarakat kota.

Akibat lain yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima di Kota Makassar adalah mereka tidak menyadari bahwa tempat pejualannya adalah jalur keramaian kendaraan sehingga sering menimbulkan kemacetan arus lalu lintas, walaupun pemerintah melarang melakukan penjualan di tempat tersebut dimana sering dilakukan pengurusan tetapi satu atau dua hari kemudian muncul kembali.

Masalah-masalah seperti inilah yang menjadi dasar pemikiran pemerintah dalam mengupayakan jalan keluar penyediaan sarana atau tempat yang layak ditempati oleh pedagang kaki lima dan penyediaan sarana

penerangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran mereka telah membantu membuka lapangan kerja. Seandainya mereka tidak diberi peluang untuk berusaha seperti ini maka bisa dibayangkan tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor informal. Kehadirannya juga telah membantu Dinas Pendapatan Daerah melalui pajak penjualan dan retribusi.

C. Bentuk Pembinaan dan Penertiban

Selanjutnya, diatur pula mengenai kegiatan para penjual kaki lima yaitu mulai dari jam 16.00-01.00 untuk hari Senin-Jumat, sedangkan hari Sabtu dan hari raya jam 16.00-02.00 dinihari dengan ketentuan :

1. . Masing-masing penjual wajib menyediakan kantong plastik sebagai tempat penampungan sampah dan wajib menjaga kesehatan, keindahan, keamanan, dan kebersihan di sekitar tempat berjualan.
2. Setiap penjual wajib memelihara sarana milik pemerintah daerah yang digunakan sebagai tempat berjualan dan bila terjadi kerusakan peralatan yang digunakan wajib diperbaiki dengan biaya sendiri.
3. Setiap penjual dilarang menggunakan meja tempat brejualan dan juga dilarang menggunakan tenda kecuali di waktu hujan.
4. Setiap penjual wajib membayar retribusi pelataran pajak pembangunan I dan retribusi kebersihan sesuai denga tarif yang ditentukan dalam peraturan daerah yang mengaturnya.
5. Terhadap setiap penjual yang tidak mentaati ketentuan tersebut maka hak untuk menggunakan tempat yang ditetapkan padanya akan dialihkan kepada orang lain yang membutuhkannya.
6. Setiap penjual tidak berhak untuk mengalihkan penggunaannya kepada pihak ketiga tanpa seizin Wali Kota Makassar

D. Tujuan Pembinaan dan Penertiban

1. Memberikan Peringatan dan Tindakan Hukum

Menurut penjelasan Staff Dinas Pendapatan Daerah bahwa pemberian tindakan hukum atas pelanggaran bagi pedagang kaki lima di Pantai Losari akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 8 Tahun 1991 seri:C Nomor 1 dengan ketentuan : dengan adanya pelanggaran dalam pasal 2 dan 3 dengan ancaman pidana kurungan selama-lamaya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-. Walikota dapat mencabut izin penggunaan tempat berdagang.

4. Melakukan pemupukan modal

Adapun cara pedagang kaki lima untuk mendapatlkan bantuan modal yaitu dengan cara bermohon kepada BRI dengan melampirkan surat izin usaha, KTP yang masih berlaku, dan perincian biaya yang dibutuhkan, namun sampai sekarang ini pedagang kaki lima yang ada di Pantai Losari belum ada yang mendapat bantuan modal berhubung adanya syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh para pedagang kaki lima seperti jaminan atas pinjaman modal tersebut.

Menurut salah seorang responden bahwa mereka masih membutuhkan bantuan modal tetapi karena bantuan modal yang diberikan oleh BRI harus ada jaminan mobil atau rumah maka mereka tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut.

5. Bantuan Kebersihan dan Kesehatan

Menurut hasil wawancara dengan Staff Penyuluhan Kesehatan Makassar dijelaskan bahwa para pedagang kaki lima di daerah Pantai Losari masih kurang kesadarannya untuk hidup sehat sehingga pemerintah selalu memberikan penyuluhan kesehatan.

Penyuluhan tersebut menyangkut masalah kebersihan makanan, tempat makanan, cara berpakaian dan cara pelayanan, serta selalu dihimbau untuk mencuci tempat makan sebanyak tiga kali. Di sini Dinas Kebersihan juga bekerjasama dengan PKK Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam memberikan sumbangan air bersih melalui mobil tangki kepada para pedagang kaki lima. Dan, yang paling penting adalah makanan yang dijual oleh pedagang kaki lima telah mendapat pengawasan obat dan makanan yang dijual para pedagang kaki lima di Pantai Losari Makassar layak untuk dikonsumsi.

6. Memperluas lapangan kerja
Bentuk-bentuk usaha yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Pantai Losari ini adalah bentuk usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan wujud nyata dari pemerataan memperoleh kehidupan yang layak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kegiatan ini menjadi wahana untuk memperoleh pekerjaan informal karena pekerjaan secara formal tidak dapat dicapai. Hal ini akan membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran.

7. Ekonomi

Dari hasil wawancara dengan seorang penjual mie goreng bahwa dia adalah pendatang dari Jawa. Ia datang ke Makassar dengan maksud mencari pekerjaan tetapi karena pekerjaan itu tidak ada maka dia memutuskan untuk membuka usaha ini agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dia menyadari bahwa menjual mie goreng ini dirasakan sudah lebih dari cukup karena banyak pengunjung yang datang ke tempat ini.

Lain halnya dengan seorang penjual suku Makassar yang berasal dari Gowa. Dia berpendapat bahwa

pemerintah cukup cermat menertibkan pekerjaannya karena jika mereka menjual pada siang hari maka akan sangat mengganggu pemandangan Pantai Losari yang indah. Pada waktu malam hari, banyak sekali pengunjung yang datang ke tempat ini jadi ini adalah saat yang paling baik untuk berjualan. Penertiban ini sangat baik. Menurutnya, pemerintah juga membantu mereka dalam mengantisipasi kebersihan dan kesehatan seperti pemberian tong sampah. Pendapatannya dirasakan cukup sebagai penjual pisang epe rasa durian.

8. Sosial

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembinaan pedagang kaki lima di Pantai Losari adalah memberikan kesadaran kepada mereka agar memiliki semangat yang tinggi dan kesabaran yang utuh dalam menekuni profesi masing-masing demi terciptanya peningkatan taraf hidup yang lebih baik dengan tetap memelihara nilai-nilai kebersihan dan keindahan kota.

9. Hukum

Tujuan pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima di Pantai Losari, Kota Makassar ditinjau dari segi hukum adalah :

- a. Dapat menunjang usaha memasyarakatkan hukum
- b. Memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat utamanya para pedagang kaki lima tentang perlunya menanamkan sikap kedisiplinan pribadi, pentingnya penggunaan waktu secara efisien dan produktif, menyadarkan masyarakat untuk lebih teratur dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi para pedagang kaki lima untuk lebih mentaati segala peraturan dan kebijakan pemerintah Kota Makassar

dalam hubungannya dengan sistem perekonomian dan tata niaga yang telah ditetapkan.

- c. Untuk menumbuhkan semangat pembangunan terutama dalam bidang pembangunan ekonomi sektor informal/pedagang kaki lima.
10. Kebersihan dan Kesehatan
Pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan kesehatan dimaksudkan agar makanan yang dijual itu bersih dan aman dari pencemaran udara seperti yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Staff penyuluhan Kesehatan Lingkungan.
 11. Menyerap tenaga kerja
Prosentase pemakaian tenaga kerja oleh pedagang kaki lima di Pantai Losari dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Prosentase Pemakaian Tenaga Kerja oleh Pedagang Kaki Lima di Pantai Losari

No	Jenis jualan	F.	Prosentase (Persen)
1	Sop dan Coto	5	33
2	Mie bakso/goreng/mie kuah	3	20
3	Es teler/pisang ijo	2	13
4	Pisang epe	1	7
5	Pallu basa	3	20
6	Kopi susu/kue	1	7
Jumlah		15	100

Sumber : Hasil Wawancara Tahun 2003

Dari 15 orang ini, kita dapat mengetahui bahwa prosentase terbesar penggunaan tenaga kerja adalah pada jenis makanan sop/coto yaitu sebanyak 33 %. Jenis makanan ini memang banyak digemari oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Makanan ini lebih susah pembuatannya tetapi penyediannya tidak begitu sulit. Selanjutnya, jenis makanan mie bakso/goreng/mie kuah sebanyak 20 %. Makanan ini disajikan begitu selesai

dimasak sehingga memerlukan tenaga kerja lebih banyak. Selanjutnya pada jenis makanan pallu basa yaitu sebanyak 20 %. Makanan ini merupakan salah satu makanan khas Sulawesi Selatan sehingga cukup banyak digemari oleh pengunjung. Selanjutnya, jenis makanan es teler/pisang ijo sebanyak 13 %. Untuk penyediaan makanan ringan seperti pisang epe dan hidangan kopi/kue menempati urutan pemakaian tenaga kerja yang sama yaitu sebanyak 7 %.

12. Pariwisata
Kehadiran pedagang kaki lima di Pantai Losari ini juga turut memberikan nuansa pariwisata karena menambah keramaian di tempat ini. Berbagai jenis makanan dijual di sana sehingga orang-orang yang datang menikmati pemandangan juga dapat menikmati makanan sesuai selera.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan penelitian ini maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Kehadiran pedagang kaki lima di Pantai Losari telah membawa dua pengaruh yang berbeda yaitu usaha ini dapat menjadi sumber pendapatan, sementara di sisi lain dapat mengganggu ketertiban umum, keindahan kota, kebersihan, dan kesehatan, kecelakaan, dan sebagainya.
2. Dasar pemikiran pemerintah sehingga Pantai Losari dijadikan sebagai tempat pedagang kaki lima adalah karena usaha ini dapat menampung tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor informal dan kehadirannya telah membantu Dinas Pendapatan Daerah melalui pajak penjualan dan retribusi.

3. Peranan pemerintah dalam Pembinaan pedagang kaki lima di Pantai Losari, Makassar adalah pemeberian izin usaha, memberikan peringatan dan tindakan hukum, melakukan pemupukan modal, bantuan kebersihan dan kesehatan penyuluhan dan bimbingan.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang perlu dalam peelitian ini adalah :

1. Dalam rangka meningkatkan usahanya dengan baik maka seharusnya pedagang kaki lima sungguh-sungguh memperhatikan semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat.
2. Sebaiknya, pemberian kredit dan modal kepada pedagang kaki lima diberi sedikit kemudahan tanpa menghilangkan ketidakpercayaan kepada pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunta, Sukarsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineke Cipta. Jakarta.
- Bohari, 1993. *Pengantar Hukum Pajak*. PT. Raja Grapindo. Jakarta Utara.
- Galang. 1985. *Nasib Gelandangan Bertahap Sedapatnya*. Lembaga Study Pembangunan. Jakarta
- Makkulau, Andi. 1988. *Karakteristik Sosial Ekonomi Tenaga Kerja Sektor Informal* di Kodya Ujung Pandang. OPP IKIP. Ujung pandang.
- Noer Effendy. 1985. *Urbanisasi, Pengangguran, dan sektor Informal* Di Kota Jakarta. Gramedia. Jakarta.
- Sujamto. 1991. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Proses Pembuatan Undang-Undang NO. 5 Tahun 1974*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hammado, Tantu. 1992. *Pedaganag Kaki Lima Asal jawa, Bali, dan Madura di Sulawesi selatan*. OPP IKIP. Ujung Pandang.
- Wiriprawiro, Karjono. 1985. *Peran sektor Informal Dikaitkan Dengan Pembinaan Dan Pengemabngan Sektor Informal*. Forum Ekonomi. Jakarta.
- Wirisardjono, Soetjipto. 1985. *Pengertian Batasan dan Permasalahan Pedagang Kaki Lima*. . Forum ekonomi. Jakarta.
- Yan Pieter Karafir, 1977. *Pemupukan Modal Pedagang Kaki Lliam*. Penelitian Study Kasus Di Daerah Tanah Abang. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Zainun, Buchari, 1985. *Perencanaan dan Pembinaan Tenaga Kerja*. Jakarta. Ghalia ndonesia.jakarta.
- _____. 1990. *Peraturan Daerah Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang Nomor 10 tahun 1990 tentang pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang*.
- _____. 1992. *Keputusan Walikota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 3479 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Pantai Losari. Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang*.

*) Penulis adalah Dosen Yayasan STIKS Tamalanrea Makassar